



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI RETNA SUPRAPTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
3. NHK : 211713

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.340.820.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/170 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 211.440.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 382.380.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 362.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 576 m2/576 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/154 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 252.250.000**

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 150.000
2. LAINNYA, VISIX SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000



6. MOTOR, VARIO A1FO2N37M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.595.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.577.612

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.647.242.612

III. HUTANG Rp. 209.166.675

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.438.075.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.